Akuntansi Pajak dan Kebijakan Ekonomi Digital
Volume. 3, Nomor. 1, Februari 2026
e-ISSN: 3046-8132; p-ISSN: 3046-868X, Hal 113-128
DOI: https://doi.org/10.61132/apke.v2i4.1901
Tersedia: https://ejournal.areai.or.id/index.php/APKE

Pengaruh Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan

Rahmawati Apia[1*], Liliana [2], Sri Rahayu Wulaningsih[3], Deta Septea[4]
[1,2,3,4] Program Studi Ekonomi Pembangnan, Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya, Indonesia
**Penulis Korespondensi: rahmawati.apia@gmail.com*

Abstract. *Poverty remains a central issue in regional development, particularly in areas with pronounced economic disparities such as South Sumatra Province. This study aims to examine the effect of Gross Regional Domestic Product (GRDP) on the poverty rate across regencies and cities in South Sumatra during the period 2020–2024. A quantitative research approach was employed using panel data regression analysis, supported by descriptive statistics and classical assumption tests. The empirical findings indicate that GRDP has a negative and statistically significant effect on poverty, suggesting that an increase in regional economic capacity contributes to reducing poverty levels. However, the relatively small coefficient signifies that economic growth has not been fully inclusive and is influenced by the structural characteristics of each region. The Fixed Effect Model was identified as the most appropriate specification, highlighting the existence of heterogeneity across districts that shapes the relationship between GRDP and poverty. These results underscore the need for development strategies that not only promote economic growth but also ensure an equitable distribution of its benefits through the reinforcement of labor-intensive sectors, enhancement of human capital, and strengthening of local economic structures. The study provides valuable insights for regional policymakers in designing more effective and sustainable poverty alleviation strategies.*

Keywords*: Economic Growth; GRDP; Panel Regression; Poverty; Regional Development.*

Abstrak. Kemiskinan masih menjadi isu sentral dalam pembangunan daerah, terutama di wilayah dengan tingkat ketimpangan ekonomi yang tinggi seperti Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan selama periode 2020–2024. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi data panel, serta didukung oleh statistik deskriptif dan pengujian asumsi klasik. Hasil estimasi menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, yang mengindikasikan bahwa peningkatan kapasitas ekonomi daerah dapat menurunkan angka kemiskinan. Namun, besaran pengaruh yang relatif kecil mencerminkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya inklusif dan dipengaruhi oleh struktur ekonomi tiap wilayah. Model Fixed Effect terpilih sebagai model terbaik, menunjukkan adanya heterogenitas antar kabupaten/kota yang mempengaruhi hubungan antara PDRB dan kemiskinan. Temuan penelitian ini menegaskan pentingnya strategi pembangunan yang tidak hanya berfokus pada percepatan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pemerataan distribusi manfaat pertumbuhan melalui penguatan sektor padat karya, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pengembangan ekonomi lokal. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pengentasan kemiskinan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata kunci: Kemiskinan; PDRB; Pembangunan Daerah; Pertumbuhan Ekonomi; Regresi Panel.

1. LATAR BELAKANG

Kemiskinan merupakan persoalan multidimensional yang terus menjadi perhatian penting dalam agenda pembangunan global. Dalam berbagai literatur ekonomi pembangunan, kemiskinan dipandang bukan hanya sebagai persoalan kurangnya pendapatan, tetapi juga keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan layak, serta distribusi sumber daya ekonomi yang tidak merata (Pertiwi & Purnomo, 2022). Pertumbuhan ekonomi yang meningkat belum tentu mampu menghilangkan kemiskinan apabila tidak disertai dengan pemerataan hasil pembangunan dan pengelolaan kependudukan yang baik. Hal ini menegaskan bahwa dinamika demografi dan kapasitas ekonomi suatu wilayah memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk tingkat kesejahteraan Masyarakat (Ningrum & Jainuddin, 2023).

Naskah Masuk: 21 September 2025; Revisi: 19 Oktober 2025; Diterima: 28 November 2025; Terbit: 30 November 2025

Kemiskinan di Indonesia merupakan isu strategis yang terus menjadi perhatian pemerintah. Meskipun angka kemiskinan nasional menunjukkan tren penurunan dari tahun ke tahun, namun tantangan yang dihadapi masih besar. Soleman & Soleman, (2022) Kemiskinan di Indonesia tidak seragam antarwilayah dan sangat dipengaruhi oleh karakteristik ekonomi daerah. Variasi kemampuan daerah dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi menyebabkan ketimpangan kemiskinan antarprovinsi dan antarkabupaten/kota (Sumarto et al., 2014). Faktor-faktor seperti tingkat industrialisasi, diversifikasi ekonomi, produktivitas sektor utama, serta kapasitas pemerintah daerah dalam menyediakan layanan publik turut menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat (Akaseh et al., 2021). Dapat di lihat data di bawah di sajikan data Persentase Penduduk Miskin Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

Tabel 1. Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022-2024.

Kabupaten/ Kota	Persentase Penduduk Miskin %				
	2020	2021	2022	2023	2024
Sumatera Selatan	12,66	12,84	11,9	11,78	10,97
Musi Banyuasin	16,13	10,75	15,19	14,9	12,88
Ogan Komering Ulu	12,75	12,62	11,61	11,46	10,68
Ogan Komering ilir	14,73	14,68	13,23	13,15	12,08
Muara Enim	12,32	12,32	11,12	10,93	9,79
Lahat	15,95	16,46	16,61	15	14,14
Musi Rawas	13,5	13,89	13,34	14,13	13,44
Banyuasin	11,17	10,75	10	9,58	9,31
OKU Timur	10,43	10,6	10,05	9,99	9,75
Oku selatan	10,85	11,12	10,58	10,36	9,86
Ogan ilir	13,36	13,82	12,33	13,28	12,3
Empat Lawang	12,63	13,35	12,03	11,8	10,78
Pali	12,62	12,91	11,76	10,91	9,82
Musi Rawas Utara	19,47	20,11	18,45	18,26	17,38
Palembang	10,89	11,34	10,48	10,22	9,77
Prabumulih	11,59	12,2	11,28	11,23	10,13
Pagar Alam	9,07	9,4	8,47	8,88	8,18
Lubuk linggau	12,71	13,23	12,68	12,65	11,14

Sumber: Bps Provinsi Sumatera Selatan, 2025.

Kemiskinan pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2020-2024 menunjukkan tren penurunan yang cukup konsisten di sebagian besar wilayah. Pada tingkat provinsi, persentase penduduk miskin menurun dari 12,66 persen pada 2020 menjadi 10,97 persen pada 2024, menggambarkan pemulihan ekonomi pasca pandemi serta meningkatnya

efektivitas program perlindungan sosial. Beberapa daerah mencatat penurunan signifikan, seperti Palembang, yang turun dari 10,89 persen menjadi 9,77 persen. Sebagai pusat pertumbuhan ekonomi provinsi, penurunan ini menunjukkan kuatnya aktivitas ekonomi urban dan peningkatan akses masyarakat terhadap layanan sosial. Daerah lain seperti Muara Enim dan Ogan Komering Ilir juga menunjukkan tren penurunan yang stabil, mencerminkan perbaikan kondisi sektor industri, pertanian, dan perdagangan.

Sebaliknya, beberapa wilayah masih mencatat tingkat kemiskinan relatif tinggi, seperti Musi Rawas Utara, meskipun mengalami penurunan dari 19,47 persen menjadi 17,38 persen. Tingginya angka kemiskinan di daerah tersebut mengindikasikan adanya tantangan struktural, seperti rendahnya produktivitas ekonomi lokal dan keterbatasan infrastruktur. Daerah dengan kemiskinan rendah seperti Pagar Alam dan Oku Selatan menunjukkan tren yang lebih stabil, menggambarkan struktur ekonomi yang lebih seimbang dan adaptif terhadap perubahan ekonomi regional.

Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) di Indonesia menjadi indikator utama yang digunakan untuk mengukur kinerja ekonomi suatu daerah (Kharisah, 2020). PDRB mencerminkan total nilai tambah yang dihasilkan seluruh sektor ekonomi di suatu wilayah dalam periode tertentu. Secara teoritis, peningkatan PDRB diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas kesempatan kerja, dan mengurangi tingkat kemiskinan melalui peningkatan aktivitas ekonomi (Prawitrisari et al., 2022). Namun, kenyataan empiris menunjukkan bahwa peningkatan PDRB tidak selalu berbanding lurus dengan penurunan kemiskinan. Hal ini dipengaruhi oleh struktur ekonomi daerah, tingkat produktivitas sektor-sektor penyumbang PDRB, serta sejauh mana masyarakat miskin dapat terlibat dalam aktivitas ekonomi yang menghasilkan nilai tambah tersebut (Prawoto & Carlina, 2023).

Menurut Padriyansyah & Syahputera, (2022) Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi dengan struktur ekonomi yang cukup beragam dan memiliki kontribusi ekonomi signifikan di wilayah Sumatera. Pertumbuhan PDRB provinsi ini ditopang oleh sektor industri pengolahan, pertanian dalam arti luas, pertambangan dan penggalian, serta perdagangan besar dan eceran. Meskipun demikian, pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan melalui peningkatan PDRB tidak diikuti secara merata oleh penurunan angka kemiskinan di seluruh kabupaten/kota (Amar & Arkum, 2024). Beberapa daerah masih menghadapi tingkat kemiskinan yang relatif tinggi, terutama wilayah yang struktur ekonominya didominasi sektor primer dengan nilai tambah rendah (Falah & Rahmawati, 2024). Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan kapasitas ekonomi antarwilayah yang berdampak langsung pada tingkat kesejahteraan

Masyarakat. Data di bawah disajiakan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2024 Sebagai Berikut:

Tabel 2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2024.

Kabupaten/ Kota	PDRB Atas Dasasr Harga Konstan				
	2020	2021	2022	2023	2024
Sumatera Selatan	37.323	38.182	39.724	41.284	42.900
Musi Banyuasin	71.843	73.382	75.553	78.009	80.917
Ogan Komering Ulu	26.914	27.271	28.480	29.618	30.800
Ogan Komering ilir	26.319	26.892	31.801	33.068	34.349
Muara Enim	68.018	71.482	76.786	82.407	86.284
Lahat	28.993	30.030	31.726	33.450	34.744
Musi Rawas	34.742	35.161	36.191	37.257	38.714
Banyuasin	23.952	24.421	25.362	26.285	27.272
OKU Timur	15.531	16.103	16.811	17.492	18.220
Oku selatan	14.102	14.456	14.958	15.383	15.888
Ogan ilir	18.021	18.469	19.159	19.821	20.532
Empat Lawang	10.515	10.764	11.177	11.532	11.924
Pali	24.290	24.451	25.175	25.990	26.924
Musi Rawas Utara	29.578	29.893	30.816	31.742	32.766
Palembang	62.478	63.784	66.609	69.496	72.549
Prabumulih	27.948	28.378	29.405	30.406	31.516
Pagar Alam	15.577	16.088	16.703	17.263	17.969
Lubuk linggau	18.569	18.888	19.478	20.082	20.748

Sumber: Bps Provinsi Sumatera Selatan, 2025.

Pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan pada periode 2020–2024 menunjukkan tren peningkatan yang stabil setelah mengalami tekanan signifikan pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19. Secara umum, seluruh wilayah mengalami pemulihan bertahap yang tercermin dari meningkatnya nilai PDRB atas dasar harga konstan, menandakan kembali menguatnya aktivitas produksi daerah dan perbaikan kondisi ekonomi makro-provinsi. Pada tingkat provinsi, PDRB meningkat dari 37.323 miliar pada 2020 menjadi 42.900 miliar pada 2024. Kenaikan ini mencerminkan proses pemulihan ekonomi yang kuat, terutama pada sektor industri pengolahan, perdagangan, dan konstruksi yang menjadi tulang punggung perekonomian Sumatera Selatan.

Beberapa daerah mencatat peningkatan PDRB tertinggi dalam nilai absolut. Kabupaten Musi Banyuasin, misalnya, naik dari 71.843 miliar pada 2020 menjadi 80.917 miliar pada 2024. Kenaikan tersebut menggambarkan dominasi sektor migas dan perkebunan yang kembali

menguat pascapandemi. Muara Enim juga menunjukkan peningkatan signifikan dari 68.018 miliar menjadi 86.284 miliar, sejalan dengan aktivitas sektor energi, pertambangan, dan industri turunan yang kembali pulih. Kota Palembang, sebagai pusat ekonomi utama provinsi, mencatat kenaikan PDRB dari 62.478 miliar pada 2020 menjadi 73.658 miliar pada 2024. Tren ini mencerminkan pulihnya sektor perdagangan besar, industri jasa, dan aktivitas konsumsi masyarakat. Kenaikan yang stabil ini menunjukkan kapasitas ekonomi perkotaan yang resilien serta peran Palembang sebagai pusat aglomerasi ekonomi regional.

Sementara itu, daerah seperti Lahat, Ogan Ilir, dan Ogan Komering Ulu memperlihatkan tren peningkatan PDRB yang lebih moderat namun konsisten. Kenaikan tersebut menggambarkan pergerakan positif sektor pertanian, perdagangan, serta industri kecil dan menengah yang menjadi basis aktivitas ekonomi masyarakat lokal. Di sisi lain, Musi Rawas Utara dan Empat Lawang menunjukkan peningkatan PDRB yang relatif lebih lambat dibandingkan daerah lainnya. Hal ini mengindikasikan adanya keterbatasan struktur ekonomi dan minimnya diversifikasi sektor produktif yang membuat wilayah tersebut lebih rentan terhadap perubahan ekonomi regional.

Dengan demikian, hubungan antara PDRB dan kemiskinan bersifat multidimensional dan ditentukan oleh dinamika struktural yang melatarbelakangi pola pertumbuhan ekonomi regional. Mutiara et al., (2024) Peningkatan PDRB tidak hanya dipandang sebagai indikator keberhasilan pembangunan, tetapi juga sebagai parameter yang harus dianalisis bersama konteks distribusional dan sektor-sektor penggerak utamanya agar mampu memberikan kontribusi optimal dalam menurunkan kemiskinan secara berkelanjutan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh PDRB terhadap kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan, dengan harapan hasilnya dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan dan strategi pengentasan kemiskinan yang lebih efektif dan tepat sasaran.

2. KAJIAN TEORI

Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan sosial dan ekonomi yang kompleks karena tidak hanya mencerminkan rendahnya pendapatan, tetapi juga keterbatasan akses terhadap sumber daya dan kesempatan hidup yang layak. Todaro, M., & Smith, (2015) Mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi ketika individu atau rumah tangga tidak mampu memenuhi standar kebutuhan hidup minimum dari sisi pendapatan, pendidikan, dan kesehatan, sementara Sukirno, (2012) menegaskan bahwa kemiskinan berkaitan dengan rendahnya produktivitas

serta struktur ekonomi yang tidak inklusif. BPS, (2023) mengukur penduduk miskin sebagai mereka yang memiliki pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan, yakni batas minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar pangan dan nonpangan. Aji, (2022) Secara konseptual, kemiskinan dibedakan menjadi dua, yaitu kemiskinan absolut, ketika pendapatan berada di bawah standar kebutuhan dasar yang ditetapkan pemerintah, dan kemiskinan relatif, yaitu kondisi ketika kesejahteraan seseorang berada di bawah rata-rata masyarakat di wilayahnya.

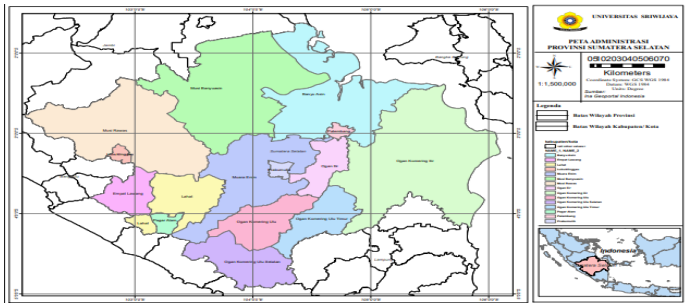
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai total barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi dalam suatu daerah dan menjadi indikator utama dalam mengukur pertumbuhan ekonomi wilayah (Sukirno, 2005). Semakin tinggi PDRB, semakin besar pula potensi peningkatan kesejahteraan masyarakat, meskipun dalam praktiknya peningkatan tersebut tidak selalu diikuti pemerataan pendapatan. Amar & Arkum, (2024) Menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi hanya akan efektif menurunkan kemiskinan apabila dibarengi dengan pemerataan distribusi pendapatan, karena tanpa itu manfaat pertumbuhan cenderung hanya dinikmati kelompok berpendapatan tinggi. Hal ini sejalan dengan temuan Nurhamidah & Mar, (2024) yang menyatakan bahwa PDRB berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan, namun efektivitasnya sangat bergantung pada inklusivitas pertumbuhan ekonomi. Mukti & Soraya, (2024) Di Provinsi Sumatera Selatan, meskipun PDRB meningkat setiap tahun dan menunjukkan pertumbuhan ekonomi positif, dampaknya terhadap penurunan kemiskinan masih terbatas karena struktur ekonomi daerah masih didominasi sektor pertambangan dan perkebunan yang bersifat padat modal serta kurang menyerap tenaga kerja.

3. METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih sebagai tempat penelitian penulis mengambil tempat di Provinsi Sumatera Selatan, tepatnya di Kabupaten/kota Sumatera selatan



Gambar 1. Lokasi Penelitian Kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan.

Sumber: Data Dolah, 2025.

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif untuk menganalisis pengaruh PDRB terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan. Data yang digunakan merupakan data sekunder PDRB ADHK, dan tingkat kemiskinan yang diperoleh dari publikasi resmi BPS serta instansi terkait. Data tersebut dianalisis menggunakan regresi linier berganda untuk menguji pengaruh masing-masing variabel, dengan didahului uji asumsi klasik guna memastikan validitas model.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode dokumentasi dengan memanfaatkan data sekunder yang dipublikasikan oleh lembaga pemerintah. Data meliputi PDRB ADHK, dan tingkat kemiskinan setiap kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan, yang diperoleh dari publikasi BPS serta tabel statistik pada situs resminya. Metode dokumentasi dipilih karena menyediakan data yang lengkap, terstandar, dan reliabel untuk analisis kuantitatif.

Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda untuk mengukur pengaruh jumlah penduduk dan PDRB terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan. Analisis dimulai dengan statistik deskriptif, kemudian dilanjutkan dengan uji asumsi klasik - meliputi uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas guna memastikan kelayakan model. Setelah persyaratan terpenuhi, uji t digunakan untuk menilai pengaruh parsial masing-masing variabel. Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur kemampuan model menjelaskan variasi kemiskinan. Seluruh analisis diolah menggunakan bantuan *Sofware* SPSS untuk menghasilkan output yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Model analisis data sebagai berikut.

$$\boldsymbol{KEM_{it} = \alpha + \beta PDRB_{it} + e_{it}}$$

Keterangan :

KEM	: Kemiskinan
PDRB	: Produk Domestik Regional Bruto
$\propto$	: Konstanta
β	: Koefisien
e	: *Error term*
i	: *Cross-section* (17 Kab/kota di Provinsi Sumatera Selatan)
t	: *Time series* (2020-2024)

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

Analisis statistik deskriptif merupakan suatu pendekatan statistika yang bertujuan untuk memberikan gambaran dari suatu kumpulan data. Metode ini berfokus pada penyajian gambaran umum mengenai distribusi variabel dan pola yang muncul dalam dataset. Dalam proses analisis ini, digunakan ukuran pusat data seperti mean (rata-rata), median (nilai tengah), maksimum, minimum, dan standar deviasi untuk mengukur sejauh mana variasi data tersebut dari nilai.

Tabel 3. Analisis Deskriptif.

	KEM	PDRB
Mean	12.29212	32364.85
Median	11.80000	27948.00
Maximum	20.11000	86284.00
Minimum	8.180000	1822.000
Std. Dev.	2.467769	21548.71
Skewness	1.064244	0.995026
Kurtosis	4.047692	3.117633
Jarque-Bera	19.93292	14.07511
Probability	0.000047	0.000878
Sum	1044.830	2751012.
Sum Sq. Dev.	511.5502	3.90E+10
Observations	85	85

Sumber: Eviews (data diolah).

Statistik deskriptif menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan (KEM) memiliki nilai rata-rata sebesar 12.29 persen, dengan nilai minimum 8.18 persen dan maksimum 20.11 persen. Hal ini menunjukkan adanya variasi tingkat kemiskinan yang cukup lebar antar kabupaten/kota selama periode penelitian. Nilai *standard deviation* sebesar 2.47 mengindikasikan tingkat penyebaran data yang moderat. Distribusi Kemiskinan juga menunjukkan kemencengan positif dengan nilai *skewness* 1.064, yang berarti sebagian besar daerah memiliki tingkat kemiskinan yang berada di bawah rata-rata, namun terdapat beberapa daerah dengan angka kemiskinan yang jauh lebih tinggi. Nilai *kurtosis* sebesar 4.047 menandakan distribusi yang lebih runcing dari distribusi normal, dan hasil uji Jarque–Bera yang signifikan (p-value 0.000047) mengonfirmasi bahwa data kemiskinan tidak berdistribusi normal secara statistik.

PDRB memiliki nilai rata-rata sebesar 32.364,85 miliar rupiah menunjukkan tingkat kapasitas ekonomi daerah yang cukup bervariasi, sebagaimana terlihat dari nilai minimum 1.822 miliar rupiah dan maksimum 86.284 miliar rupiah. *Standard deviation* yang tinggi, yaitu

21.548,71, mencerminkan adanya kesenjangan yang besar antar daerah dalam hal kekuatan ekonomi. Nilai *skewness* 0.995 menunjukkan distribusi yang sedikit condong ke kanan, mengindikasikan bahwa sebagian besar daerah memiliki PDRB yang berada di bawah rata-rata, namun terdapat beberapa daerah dengan PDRB yang sangat tinggi. Nilai *kurtosis* 3.117 berada dekat dengan distribusi normal, meskipun uji Jarque–Bera menghasilkan *p-value* 0.000878 yang menunjukkan bahwa data PDRB juga tidak berdistribusi normal secara ketat. Secara keseluruhan, statistik deskriptif kedua variabel menunjukkan adanya variasi yang cukup besar antar daerah, baik dalam tingkat kemiskinan maupun kapasitas ekonomi, yang menjadi dasar penting bagi analisis regresi panel dalam penelitian ini.

Uji Korelasi

Tabel 4. Uji Korelasi.

	KEM	PDRB
KEM	1	0.05377
PDRB	0.05377	1

Sumber: Eviews (data diolah).

Hasil pengujian multikolinearitas berdasarkan matriks korelasi menunjukkan bahwa nilai korelasi antara variabel PDRB dan KEM hanya sebesar 0.05377. Nilai ini berada jauh di bawah batas umum yang digunakan untuk mendeteksi multikolinearitas, yaitu 0.80. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami masalah multikolinearitas, karena hubungan antar variabel independen berada pada tingkat yang sangat rendah. Kondisi ini memastikan bahwa variabel PDRB berdiri sebagai prediktor yang independen dan tidak saling mempengaruhi secara kuat dengan variabel lain, sehingga estimasi koefisien regresi dapat diperoleh secara stabil dan interpretasi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dapat dilakukan dengan lebih akurat. Tidak ditemukannya gejala multikolinearitas memperkuat validitas model yang digunakan dalam penelitian ini.

Hasil Estimasi

Tabel 5. Hasil Estimasi.

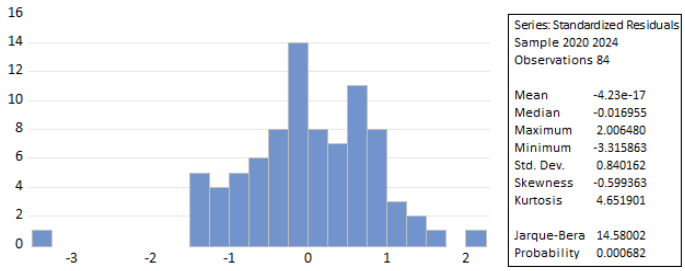
Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistik	Prob.
C	13.50463	0.558636	24.17432	0.0000
PDRB	-3.75E-05	1.70E-05	-2.207425	0.0307
		Effects Specification		
R-squared	0.884716	Mean dependent var		12.29212
Adjusted R-square	0.855465	S.D. dependent var		2.467769
S.E. of regression	0.938192	Sum squared resid		58.97369
F-statistic	30.24542	Durbin-Watson stat		2.040964

Prob(F-statistic)	0.000000	Uji Normalitas	0.000682
Cross Section Effect			
Pengujian Model Terbaik	Prob	Hasil Terpilih	
Uji Chow	0.0000	Fixed Effect	
Uji Hausman	0.1560	Random Effect	
Uji Lagrange Multiplier	0.0000	Chow Effect	

Sumber: Eviews (data diolah).

Hasil estimasi regresi panel menunjukkan bahwa variabel PDRB memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, dengan koefisien sebesar –0.0000375 dan nilai probabilitas 0.0307. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan aktivitas ekonomi daerah mampu menurunkan angka kemiskinan, meskipun dengan besaran pengaruh yang relatif kecil secara numerik. Konstanta model sebesar 13.50463 yang signifikan menunjukkan bahwa ketika PDRB tidak mengalami perubahan, tingkat kemiskinan berada pada nilai dasar tersebut. Secara keseluruhan, model memiliki kemampuan prediksi yang sangat baik, tercermin dari nilai R-squared sebesar 0.8847 yang berarti 88,47 persen variasi kemiskinan dapat dijelaskan oleh PDRB dan efek perbedaan antar daerah. Nilai F-statistic yang signifikan menegaskan bahwa model secara keseluruhan layak digunakan, sementara nilai Durbin–Watson sebesar 2.04 menunjukkan tidak adanya masalah autokorelasi serius. Uji normalitas menghasilkan nilai probabilitas 0.000682 yang mengindikasikan residual belum berdistribusi normal secara sempurna, meskipun dalam regresi panel efek tetap hal ini umum terjadi dan tidak selalu mengganggu estimasi. Dari sisi pemilihan model, hasil Uji Chow dengan probabilitas 0.0000 menunjukkan bahwa model Fixed Effect lebih tepat dibandingkan Common Effect. Selanjutnya, Uji Hausman dengan nilai probabilitas 0.1560 mengindikasikan tidak adanya perbedaan signifikan antara Fixed Effect dan Random Effect, namun hasil Uji Lagrange Multiplier yang signifikan (0.0000) mengonfirmasi bahwa model panel lebih baik daripada model Common Effect. Dengan mempertimbangkan keseluruhan pengujian tersebut, model Fixed Effect menjadi model terbaik yang digunakan dalam penelitian ini.

Uji Normalitas



Gambar 2. Uji Normalitas.

Hasil uji normalitas berdasarkan histogram residual menunjukkan bahwa distribusi residual cenderung mengelompok di sekitar nilai nol, yang merupakan karakteristik umum dari distribusi yang mendekati normal. Namun demikian, bentuk histogram tampak sedikit miring ke kiri, sejalan dengan nilai *skewness* sebesar –0.599 yang menandakan adanya kemiringan negatif. Nilai *kurtosis* sebesar 4.651 juga menunjukkan kecenderungan distribusi yang lebih "runcing" dibandingkan distribusi normal standar. Hasil uji Jarque–Bera menghasilkan nilai sebesar 14.58002 dengan probabilitas 0.000682, yang berarti nilai ini berada di bawah tingkat signifikansi 5 persen. Dengan demikian, secara statistik residual tidak memenuhi asumsi distribusi normal sempurna.

Meskipun demikian, dalam konteks regresi panel, terutama model *fixed effect*, pelanggaran asumsi normalitas residual tidak selalu menjadi masalah serius selama estimator tetap bersifat *unbiased* dan *consistent*. Hal ini terutama karena ukuran sampel yang relatif memadai serta sifat model panel yang mengutamakan konsistensi estimasi dibandingkan normalitas sempurna dari residual. Secara keseluruhan, meskipun distribusi residual tidak normal secara ketat, hasil estimasi tetap dapat digunakan dan tetap dianggap reliabel untuk analisis inferensial.

Uji Heterokedastisitas

Panel Cross-section Heteroskedasticity LR Test
Equation: UNTITLED
Specification: KEM C PDRB
Null hypothesis: Residuals are homoskedastic

	Value	df	Probability
Likelihood ratio	73.79051	17	0.0000

LR test summary:

	Value	df
Restricted LogL	-196.7655	83
Unrestricted LogL	-159.8702	83

Gambar 3. Uji Heterokedastisitas.

Hasil uji Panel Cross-section Heteroskedasticity Likelihood Ratio menunjukkan nilai *likelihood ratio* sebesar 73.79051 dengan *p-value* 0.0000, yang berada jauh di bawah tingkat signifikansi 5 persen. Temuan ini mengindikasikan bahwa hipotesis nol yang menyatakan residual bersifat homoskedastik harus ditolak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam model terdapat masalah heteroskedastisitas antar cross-section, yang berarti varians error tidak konstan pada masing-masing kabupaten/kota. Kondisi ini umum terjadi dalam data panel karena adanya perbedaan karakteristik struktural antar daerah, seperti skala ekonomi, kapasitas pembangunan, atau dinamika sosial-ekonomi yang tidak sepenuhnya ditangkap oleh variabel model. Kehadiran heteroskedastisitas tidak menyebabkan estimasi menjadi bias, tetapi dapat membuat standar error menjadi tidak akurat sehingga inferensi statistik menjadi kurang

reliabel. Oleh karena itu, model sebaiknya menggunakan *robust standard errors* atau *cross-section weights* untuk menghasilkan estimasi yang lebih konsisten dan dapat dipercaya.

Pembahasan

PDRB memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan PDRB mencerminkan pertumbuhan kapasitas ekonomi daerah yang mampu mendorong peningkatan pendapatan masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan. Ketika aktivitas ekonomi meningkat, sektor-sektor produktif seperti industri pengolahan, perdagangan, maupun pertanian modern menghasilkan nilai tambah yang lebih besar sehingga memperluas kesempatan kerja dan memperkuat daya beli masyarakat (Herlambang & Rachmawati, 2023). Sebaliknya, ketika pertumbuhan ekonomi melambat dan PDRB berada pada level rendah, kemampuan ekonomi daerah untuk menyerap tenaga kerja dan menyediakan pendapatan masyarakat menurun, sehingga tingkat kemiskinan cenderung meningkat (Widjajanto et al., 2024)

Tren data PDRB kabupaten/kota pada periode 2020–2024 memperlihatkan adanya peningkatan yang stabil pascapandemi, namun dengan fluktuasi yang cukup lebar antarwilayah. Beberapa daerah seperti Musi Banyuasin dan Muara Enim mencatat kenaikan PDRB tinggi yang didorong oleh sektor migas dan pertambangan, sedangkan wilayah seperti Musi Rawas Utara dan Empat Lawang menunjukkan peningkatan yang relatif lambat. Ketimpangan inilah yang turut menjelaskan variasi tingkat kemiskinan antar daerah. Dalam konteks ini, peningkatan PDRB tidak selalu menghasilkan penurunan kemiskinan secara merata karena struktur ekonomi tiap wilayah berbeda dan sebagian sektor dominan bersifat padat modal sehingga tidak memberikan efek langsung terhadap kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah (Sumarto et al., 2014).

Hubungan negatif antara PDRB dan kemiskinan terjadi karena pertumbuhan ekonomi daerah mencerminkan peningkatan produktivitas dan efisiensi sektor-sektor ekonomi. Ketika PDRB meningkat, daerah dianggap lebih mampu menyediakan lapangan pekerjaan, memperluas akses terhadap modal, dan meningkatkan aktivitas ekonomi lokal, sehingga tingkat kemiskinan dapat ditekan (Salfina et al., 2025). Hasil uji regresi panel menunjukkan bahwa PDRB memiliki pengaruh signifikan terhadap penurunan kemiskinan, mengindikasikan bahwa peningkatan output ekonomi memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan Masyarakat (Samiani et al., 2024). Namun, koefisien yang relatif kecil menggambarkan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya inklusif. Artinya, meskipun nilai PDRB meningkat, sebagian kelompok masyarakat tetap memiliki keterbatasan dalam mengakses

peluang ekonomi akibat faktor seperti pendidikan rendah, distribusi infrastruktur yang tidak merata, serta dominasi sektor padat modal (Jayanto & Aida, 2022).

Beberapa daerah dalam tabel PDRB mengalami peningkatan yang cukup signifikan selama 2020–2024. Muara Enim, misalnya, mengalami kenaikan PDRB yang besar akibat pemulihan sektor energi dan industri berat. Namun penurunan kemiskinan di daerah tersebut tidak sebanding dengan kenaikan PDRB, yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh sektor-sektor yang tidak menyerap tenaga kerja secara luas (Pertiwi & Purnomo, 2022). Pola serupa juga terlihat di Musi Rawas Utara, di mana kenaikan PDRB tidak langsung diikuti penurunan kemiskinan, kemungkinan disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur daerah, tingginya ketergantungan pada sektor primer, serta rendahnya diversifikasi ekonomi.

Sebaliknya, daerah seperti Palembang dan Banyuasin yang memiliki sektor ekonomi lebih beragam - termasuk perdagangan, jasa, dan industri kecil - mampu merasakan manfaat pertumbuhan ekonomi secara lebih merata (Yoga & Diputra, 2024). Hal ini terlihat dari tren penurunan kemiskinan yang lebih stabil dibanding wilayah yang ekonominya kurang terdiversifikasi. Kondisi ini menegaskan bahwa struktur ekonomi yang lebih inklusif berperan penting dalam memastikan bahwa pertumbuhan PDRB benar-benar diterjemahkan menjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat (Enzelina Puspita Sari, 2024).

Untuk mengatasi perbedaan dampak PDRB terhadap kemiskinan, pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Selatan perlu menerapkan kebijakan yang memperkuat inklusivitas pertumbuhan ekonomi. Daerah dengan dominasi sektor padat modal perlu mendorong diversifikasi ekonomi melalui pengembangan industri kreatif, UMKM berbasis lokal, serta sektor pertanian modern yang berorientasi pasar. Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan kerja juga diperlukan untuk memastikan masyarakat dapat berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi yang menghasilkan nilai tambah tinggi (Asmara et al., 2025). Dalam konteks ini, pertumbuhan ekonomi tidak hanya harus kuat, tetapi juga merata dan berpihak pada kelompok berpendapatan rendah. Pembenahan infrastruktur, akses keuangan inklusif, serta peningkatan konektivitas antar wilayah menjadi strategi penting untuk memastikan manfaat PDRB dapat dirasakan secara luas oleh seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten/kota Sumatera Selatan.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa PDRB memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan, yang

mengindikasikan bahwa peningkatan kinerja ekonomi daerah pada umumnya berkontribusi terhadap penurunan jumlah penduduk miskin. PDRB merefleksikan kapasitas produksi dan intensitas aktivitas ekonomi suatu wilayah, sehingga pertumbuhannya berpotensi memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Meskipun demikian, hubungan antara PDRB dan kemiskinan tidak selalu bersifat langsung dan proporsional, karena dipengaruhi oleh kondisi struktural perekonomian daerah, seperti dominasi sektor padat modal, tingkat urbanisasi, kualitas sumber daya manusia, serta pemerataan infrastruktur. Selain faktor internal, pengaruh PDRB terhadap kemiskinan juga dipengaruhi oleh faktor eksternal, antara lain fluktuasi harga komoditas, dinamika ekonomi global, serta kebijakan fiskal dan sektoral pemerintah pusat. Kondisi tersebut dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi tidak selalu diikuti oleh peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya peran kebijakan pemerintah daerah yang inklusif, khususnya melalui penguatan sektor padat karya, pengembangan UMKM, dan peningkatan kualitas tenaga kerja, agar pertumbuhan ekonomi yang tercermin dalam PDRB dapat lebih efektif dalam menurunkan tingkat kemiskinan dan mengurangi ketimpangan antarwilayah.

DAFTAR PUSTAKA

Aji, Y. I. T. (2022). The effect of village income and gross regional domestic product on poverty in Indonesia. *Jurnal Bina Praja, 14*, 315–328. https://doi.org/10.21787/jbp.14.2022.315-328

Akaseh, A., Muhdar, & Mardiana, A. (2021). Analisis pengaruh produk domestik regional bruto (PDRB) terhadap kemiskinan di Kabupaten Bone Bolango. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal, 17*, 223–244. https://doi.org/10.30603/ab.v17i2.2269

Amar, H., & Arkum, D. (2024). Pengaruh produk domestik regional bruto, indeks pembangunan manusia, dan tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Bangka. *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 10*(1), 93–112. https://doi.org/10.52447/gov.v10i1.8077

Asmara, A. P., Rasbi, M., Ishak, I., Fasiha, F., Nur, M., Muhajir, A., & Imam, M. A. (2025). Does gross regional domestic product (GRDP) affect poverty in South Sulawesi? Two-stage least squares (2SLS) approach. *Jurnal Ekonomi Pembangunan, 17*(1).

Badan Pusat Statistik. (2023). *Persentase penduduk miskin menurut kabupaten/kota (persen)*. Badan Pusat Statistik.

Falah, M. A., & Rahmawati, F. (2024). The GRDP per capita, human development index, open unemployment rate, regional expenditure, and poverty in East Java Province. *Jurnal Ekonomi Studi Pembangunan, 25*(1), 1–16. https://doi.org/10.18196/jesp.v25i1.21327

Herlambang, B., & Rachmawati, N. S. A. (2023). Pengaruh PDRB, IPM, dan jumlah penduduk terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi Bisnis, 27*(1), 52–60. https://doi.org/10.24123/jeb.v27i1.5732

Jayanto, A. V., & Aida, N. (2022). Analysis of gross regional domestic product, open unemployment rate, and human development index on the percentage of poor people on the island of Sumatra. *Journal of Economics and Business, 3*(5), 257–266.

Kharisah, U. (2020). Pengaruh produk domestik regional bruto dan pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Kolaka tahun 2010–2020. *Jurnal Ekonomi Pembangunan, 5*.

Mukti, M. T. P., & Soraya, S. (2024). Pengaruh produk domestik regional bruto (PDRB) terhadap kemiskinan dan tenaga kerja. *Jurnal Sosial Nusantara, 2*(2), 2022–2025. https://doi.org/10.35746/jsn.v2i2.387

Mutiara, S. R., Eliyati, N., Suprihatin, B., Maiyanti, S. I., & Universitas Sriwijaya. (2024). Pemodelan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2018–2023 menggunakan regresi data panel. *Jurnal Penelitian Sains, 26*(3), 391–398. https://doi.org/10.56064/jps.v26i3.1095

Ningrum, T. G., & Jainuddin. (2023). Influence of gross regional domestic product and investment against poverty in East Kalimantan Province. *Journal of Contemporary Business, 7*(2), 36–44. https://doi.org/10.47200/jcob.v7i02.2215

Nurhamidah, R., & Mar, A. (2024). Determinant of income convergence in South Sumatra Province. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Indonesia, 15*(1). https://doi.org/10.21002/jepi.v15i1.554

Padriyansyah, & Syahputera, R. (2022). Analisis PDRB, IPM, dan jumlah penduduk terhadap jumlah kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis, 7*(1), 31–43. https://doi.org/10.32502/jab.v7i1.4567

Pertiwi, E., & Purnomo, D. (2022). Analysis of the effect of gross regional domestic product (GRDP), human development index (IPM), and open unemployment rate (TPT) on poverty rate in Lampung Province. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 47–61.

Prawitrisari, I. W., Indarti, D., & Wijayanto, B. (2022). Analisis hubungan PDRB dan kemiskinan di Kabupaten Bantul tahun 2004–2022. *DEKAT: Jurnal Ekonomi dan Kebijakan, 1*(2), 71–85. https://doi.org/10.24246/dekat.v1i2.10733

Prawoto, N., & Carlina, E. (2023). Determining factors of poverty in East Java Province, Indonesia. *Asian Journal of Economics, Business and Accounting, 23*(12), 49–57. https://doi.org/10.9734/AJEBA/2023/v23i12985

Salfina, L., Sonia, Z., & Murni, Y. (2025). Effect of gross regional domestic product and unemployment on poverty levels in Indonesia. *Journal of Economics and Policy, 4*(2), 240–255.

Samiani, S., Endang, E., Susilo, J. H., & Astuti, H. (2024). Dynamic panel data modeling of Indonesia's poverty level 2013–2022. *Jurnal Ekonomi Studi Pembangunan, 25*(1). https://doi.org/10.18196/jesp.v25i1.21079

Sari, N. E. P. (2024). Pengaruh PDRB terhadap kemiskinan di Kalimantan Barat tahun 2017–2022. *EkoDestinasi, 2*(1), 36–56. https://doi.org/10.59996/ekodestinasi.v2i1.409

Soleman, R., & Soleman, R. (2022). Determinants of poverty rate in Eastern Indonesia. *Journal of Indonesian Economy and Trade, 7*(2), 261–275. https://doi.org/10.20473/jiet.v7i2.39392

Sukirno, S. (2005). *Mikroekonomi: Teori pengantar*. RajaGrafindo Persada.

Sukirno, S. (2012). *Makroekonomi: Teori pengantar*. RajaGrafindo Persada.

Sumarto, S., Vothknecht, M., & Wijaya, L. (2014). Explaining the regional heterogeneity of poverty: Evidence from decentralized Indonesia. *World Development, 64*, 801–814.

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic development* (12th ed.). Pearson Education.

Widjajanto, T., Agus, I., & Hapsari, V. (2024). Analisis faktor yang berpengaruh terhadap PDRB serta dampaknya terhadap jumlah penduduk miskin pada tujuh kabupaten di Jawa Tengah periode 2015–2022. *Sosioekonomika, 16*(3), 267–278. https://doi.org/10.30998/sosioekons.v16i3.24831

Yoga, G. A. D. M., & Diputra, G. I. S. (2024). Analisis data panel determinan kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali. *Bali Accounting and Business Management Journal, 6*(1), 1–15. https://doi.org/10.36985/bacmbk62